



Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Effective from Volume 5, No. 2, 2020

ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Meilinda Trisilia

Universitas Bina Nusantara, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Meilinda.trisilia@binus.ac.id

ABSTRAK

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah dituntut semakin realistis dan transparan. Di era digital, melalui program *e-government*, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kendali, dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dalam rangka penerapan *Good Governance* (CG) untuk pemerintahan bebas KKN. Penyusunan ASB (Analisis Standar Belanja) akan membantu pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan serta efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat tercapai. Penyusunan ASB ini bertujuan untuk membentuk model ASB agenda *meeting* di Kantor yang menjadi indikator penilaian tingkat kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode analisis data menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menghasilkan model ASB yang layak sehingga dapat digunakan sebagai pagu (acuan) dalam menyusun anggaran rapat di dalam dan di luar kantor pemerintah Kabupaten Lumajang.

ABSTRACT

The formulation and management of regional budgets are demanded to be more realistic and transparent. In the digital era, through the e-government program, it is hoped that it can increase transparency, control and accountability of government implementation in the context of implementing Good Governance (CG) for the corruption-free government. The formulation of ASB will help the management of regional finances to be more transparent, fair, accountable and achieve efficiency in regional government budgets. This ASB preparation aims to form an ASB model for meeting agenda in the office which becomes an indicator for assessing the fairness of the workload and the cost of these activities. This study uses descriptive research and data analysis methods using Ordinary Least Square (OLS). This study produces a feasible ASB model so that it can be used as a ceiling (reference) in preparing the budget for meetings inside and outside the Lumajang Regency government office..

Volume 5

Nomor 2

Halaman 87-92

Makassar, Desember 2020

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

23 November 2020

Tanggal Revisi

23 November

Tanggal diterima

28 Januari 2021

Similarity Found: 7%

Statistics: 165 words

Plagiarized / 2272 Total words

Kata Kunci :

ASB, Ordinary Least Square, Model Regresi

Keywords :

ASB, Ordinary Least Square, Model Regresi



PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan daerah, salah satunya urusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah disesuaikan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan karakteristik daerah. Kekurangan anggaran mengakibatkan pembangunan daerah dapat terhambat, begitupun juga sebaliknya. Terdapat 3 faktor penghambat yaitu (1) ketidaklengkapan dasar hukum, (2) kurangnya kemampuan SDM, dan (3) kurangnya koordinasi antar *stakeholder* (Maharshiyam, 2016) (4) ASB tidak efektif dan sulit dipahami, (5) disposisi/sikap, (6) peran *Budget Team Local Government* (Tangkowit et al., 2017). Menurut PP Nomor 12 tahun 2019, ada 4 (empat) jenis belanja yang dianggarkan pada analisis standar belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kendati demikian, tidak semua pemerintah daerah memiliki komponen lengkap pada analisis standar belanjanya (Tanujaya, 2020). Penyusunan anggaran daerah harus mempertimbangkan program kerja di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga anggaran tersebut dapat diberikan secara adil dan wajar antar kegiatan sejenis, program, dan SKPD.

Desakan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah mulai tidak terbendung. Agar kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terpenuhi dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (Rokhimakhumullah, 2012). Di pihak lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan *monitoring* kinerja pemerintah daerah melalui anggaran. Bentuk *monitoring* tersebut berkenaan dengan *agency theory* (teori agen) di mana pemerintah sebagai agent dan DPRD sebagai *principal* (Zeyn, 2014). Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB). Tujuannya adalah efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat tercapai. ASB merupakan suatu instrumen untuk menilai tingkat kewajaran beban kerja dan pengeluaran (biaya) yang dikonsumsi untuk melaksanakan suatu aktivitas. Rapat dinas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk instansi seperti Pemerintahan Daerah (PemDa).

Adapun pelaksanaan rapat di pemerintahan seperti PemDa, dilaksanakan di internal / eksternal kantor. Manfaat dilakukan rapat dinas di luar kantor untuk mendorong efektivitas keberhasilan rapat karena tempat rapat yang lebih representatif. Pada beberapa kasus seringkali pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan rapat dinas atau pertemuan di luar kantor terutama di hotel dengan menggunakan satuan biaya perjalanan dinas, yang sebenarnya dapat diselenggarakan pada internal kantor. Namun demikian, sistem *meeting* di luar kantor tidak dapat ditiadakan begitu saja, mengingat kapasitas gedung yang tersedia di PemDa tidak mencukupi jumlah pegawai yang ada seperti PemDa Kabupaten Lumajang sehingga pada beberapa agenda tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan di dalam kantor. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan anggaran (ASB) yang tepat agar anggaran yang diberikan dapat wajar, adil dan tidak merugikan pihak manapun serta seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan semestinya.

METODE PENELITIAN

Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan standar dalam menganalisis biaya setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh Suatu Satuan Kerja Daerah (SKPD) dalam satu periode anggaran (Mulyadi, 2007). Kegiatan yang dimaksud merupakan merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh unit kerja pada SKPD. Hal

tersebut merupakan bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. ASB memiliki peran penting dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah (Bastian, 2006).

Pendekatan Perilaku Biaya

Perilaku biaya digunakan untuk mendeskripsikan apakah biaya yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami perubahan jika output mengalami perubahan. Menurut Mulyadi (2007), biaya (*cost*) yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang dan jasa di sektor swasta maupun publik dikategorikan dalam tiga jenis yaitu biaya tetap (*fixed cost*), biaya variabel (*variable cost*) dan biaya gabungan (*mixed cost*). Pengelompokan biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah daerah tidak mudah dilakukan karena cenderung bersifat campuran. Sehingga seringkali biaya yang diketahui hanya biaya total dan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memisahkan biaya total menjadi biaya tetap dan variabel. Metode yang dapat digunakan adalah metode scatterplot, metode titik tertinggi dan metode regresi.

Metode Estimasi Model Regresi

Pada penentuan perilaku *cost* menggunakan metode estimasi model regresi, diasumsikan bahwa hubungan antara *cost* dan *volume of activity* berbentuk linier.

$$Y = a + bX \quad 1)$$

Di mana Y merupakan variabel dependen (variabel tidak bebas) dan X merupakan variabel independen (variabel bebas). Pendugaan parameter regresi yaitu *intercept* (*fixed cost*) dan *slope* (*average variable cost*) dapat dilakukan menggunakan metode OLS. Alasan penggunaan metode OLS adalah untuk meminimalkan jumlah kuadrat residual. Apabila asumsi regresi klasik terpenuhi maka metode kuadrat terkecil otomatis memiliki sifat BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*), yaitu sifat tidak bias dan memiliki ragam/varian yang minimum. Rumus OLS untuk menduga parameter tersebut adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum x)}{n}, \quad (2)$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Sumber : Tanjung (2012)

Tahapan Analisis Standar Belanja (ABS)

Penyusunan Analisis Standar Belanja terdiri dari tiga tahap berikut:

1. Tahap I, merupakan tahap pengumpulan data dimana semua SKPD mengumpulkan data program yang hendak dilaksanakan agar mendapatkan acuan awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pula identifikasi objek belanja pada alokasi anggaran masing-masing kegiatan di SKPD.
2. Tahap II, merupakan penyetaraan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan rincian atas program kegiatan dari tahap pengumpulan data ke dalam kategori program / kegiatan yang memiliki kesamaan / kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang setara.
3. Tahap III, merupakan proses pembentukan model ASB dari *cluster* (kelompok) yang ada pada tahap II.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Analisis

Berdasarkan hasil rekapitulasi data DPA-SKPD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui bahwa di pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 terdapat 68 SKPD dan mempunyai 904 kegiatan dan 2354 sub kegiatan yang direncanakan. Dari 904 kegiatan dan 2354 sub kegiatan tersebut diperoleh sebanyak 36 kelompok program kerja yang memiliki kesamaan dalam hal pola program dan bobot kerja setara. Selanjutnya dari sebanyak 36 kelompok kegiatan setara tersebut ditetapkan 27 kelompok kegiatan yang akan dibuatkan model Analisis Standar Belanja (ASB). Penurunan jumlah dari sebanyak 33 kelompok kegiatan menjadi sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut terjadi karena selain pada sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tipikal di setiap SKPD, juga karena kegiatan tersebut memenuhi syarat pemodelan ASB.

Analisis Tahap I : Pembuatan Database Berdasarkan SKPD

Dalam penyusunan model ASB tahap II, *database* dari tahap I dikelompokkan menjadi 33 kelompok kegiatan yang mempunyai kemiripan pola program dan bobot kerja yang setara. Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap II dilakukan analisis deksriptif. Sehingga didapatkan informasi terdapat 36 kelompok kegiatan setara dengan 2352 Sub Kegiatan. Penurunan jumlah Sub Kegiatan menjadi 2352 Sub Kegiatan dikarenakan terdapat 2 Sub Kegiatan yang tidak memiliki pagu anggaran. Selain itu juga didapatkan informasi mengenai pagu anggaran maksimum, minimum, dan rata-rata.

Analisis Tahap II : Penyetaraan Kegiatan ASB

Dalam penyusunan model ASB tahap II, *database* dari tahap I dikelompokkan menjadi 33 kelompok kegiatan yang mempunyai kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan (setara). Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap II dilakukan analisis deksriptif. Sehingga didapatkan informasi terdapat 36 kelompok kegiatan setara dengan 2352 Sub Kegiatan.

Analisis Tahap III

Perancangan Format ASB

Pada analisis tahap III, dilakukan tahap perancangan format ASB dengan menggunakan analisis regresi dengan pendekatan / cara Kuadrat Terkecil (MKT) dalam proses hipotesa parameter *fixed cost* dan *variable cost*. Variabel independent (X) yang digunakan dalam pemodelan ASB adalah *cost driver* sedangkan variabel *dependen* (Y) adalah total pagu anggaran kegiatan. Pembentukan *cluster* pada SKPD di Kabupaten perlu dilakukan agar data lebih homogen dan pendugaan parameter lebih presisi. Selanjutnya dilakukan perumusan ASB dari tahap-tahap sebelumnya. Berikut hasil pembentukan model untuk jenis kegiatan penyelenggaraan rapat di dalam kantor dan jenis kegiatan penyelenggaraan rapat (*meeting*) di luar kantor.

Tabel 1 Model / Format ASB

Pengendali Belanja (Cost driver)	Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)	Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)	Formula ASB
Jumlah peserta rapat	-	Rp 66.000 per peserta rapat	$Rp66.000 \times \text{jumlah peserta rapat}$
Jumlah peserta rapat	-	Rp 169.050 per peserta rapat	$Rp169.050 \times \text{jumlah peserta rapat}$

Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)

Deskripsi

Kegiatan penyelenggaraan rapat di dalam kantor merupakan Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Sedangkan kegiatan penyelenggaraan rapat di luar kantor diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Berikut merupakan rata-rata alokasi objek belanja rapat.

Tabel 2 Alokasi Objek Belanja Rapat

Objek Belanja Rapat Dalam Kantor	N	Rata-rata (%)
Belanja Jasa Kantor	11	15.17
Belanja Cetak dan Penggandaan	13	11.11
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4	40.68
Belanja Makanan dan Minuman	45	33.04
Objek Belanja Rapat Luar Kantor	N	Rata-Rata (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	1	2.58
Belanja Jasa Kantor	4	24.27
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	2.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir	2	17.63
Belanja Makanan dan Minuman	12	42.19
Belanja Perjalanan Dinas	11	11.33

Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)

Kelayakan Model ASB

Model ASB dikatakan layak ketika nilai *variable cost* (β_1) signifikan ($p\text{-value} < \alpha$) dan model tidak layak ketika nilai *variable cost* (β_1) tidak signifikan ($p\text{-value} > \alpha$), di mana α yang digunakan sebesar 0,05. Berapapun nilai N (sekalipun jumlah data kecil), apabila sudah signifikan maka model dianggap layak untuk digunakan karena dianggap sudah representatif. Kebaikan model bergantung pula dengan nilai *R-square*. Nilai *R-square* menunjukkan bahwa kontribusi variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

Tabel 3. Kelayakan Model ASB

N	R-Square	Sig	Layak/Tidak layak
216	0.4110	0.000	Layak
58	0.4460	0.000	Layak

Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa model ASB rapat di dalam kantor dan di luar kantor layak digunakan. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan, dalam hal ini rapat.

SIMPULAN

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu pedoman yang wajib disusun dari tahun ke tahun dalam penetapan belanja daerah. Penentuan alokasi belanja terkadang dilakukan tanpa alasan yang pasti untuk setiap alokasi, oleh karena itu ASB dapat digunakan untuk menetapkan / alokasi biaya dan anggaran untuk kegiatan SKPD agar lebih efisien. Model ASB yang diperoleh dapat dijadikan standar, sehingga pagu anggaran setiap kegiatan lebih terukur. Data DPA-SKPD Kabupaten Lumajang Tahun

Anggaran 2019 yang dijadikan data analisis untuk pembentukan model ASB Tahun 2019 cukup bagus sehingga menghasilkan model – model ASB yang efisien dan efektif serta layak, khususnya model ASB untuk kegiatan Rapat di Dalam Kantor dan rapat di Luar Kantor. Beberapa rekomendasi dari penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyusunan ASB periode selanjutnya agar selalu memperhatikan atau menimbang kembali batas atas dan batas bawah *cost driver* (jumlah peserta) karena berkaitan dengan kapasitas gedung.
2. Diperlukan pembaruan (*update*) ASB di setiap tahun secara rutin dengan pertimbangan adanya perubahan harga-harga umum yang terjadi sebagai akibat faktor inflasi dan kebijakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2007. *Penganggaran dan Penilaian Kewajaran Standar Analisis Belanja (SAB)*.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyadi. 2007. *Activity Based Cost System: Sistem Informasi Biaya Untuk Pemberdayaan Karyawan Pengurangan dan Penentuan Secara Akurat Kos Produk dan Jasa*. BPF Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Artikel Online

- Maharshiyam, S. (2016). *Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Di Pemerintah Kota Malang*. Universitas Brawijaya.
- Nursini. 2010. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tersedia di <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/22397>
- Rokhimakhumullah, D. N. F. (2012). Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 1(2), 1-15.
- Tangkowit, R. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, Vol. 8(1), 1-11.
- Tanujaya, F. W. (2020). *Identifikasi Jumlah Standar Belanja Melalui Analisis Standar Belanja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. STIE Indonesia Banjarmasin.
- Zeyn, E. (2014). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika Journal*, Vol. 10(1), 52-62.